

## DEWAN “BONGKAR” PROYEK DI DINAS PK MALUKU SARAT KKN



Sumber Gambar : <https://www.kabartimurnews.com/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menemukan sejumlah Paket Proyek Pembangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Provinsi Maluku bermasalah dan sarat praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Proyek-proyek bermasalah ini, berkaitan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023. Fakta ini terbongkar setelah DPRD Provinsi Maluku, melalui Komisi IV melakukan pengawasan tahap pertama di enam Kabupaten/Kota, di Maluku. Bahkan, dewan juga menemukan ada satu proyek dengan nilai miliaran rupiah dikerjakan oleh adik dari Kepala Dinas (Kadis) PK, Insun Sangadji. “Proyek yang dikerjakan oleh adik Kadis PK itu, bermasalah,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary dalam rapat internal bersifat terbuka di “Senayan” Karang Panjang, Ambon, Senin (1/4).

Menurut Samson Atapary, ada beberapa temuan pihaknya yang anggap serius terutama di Dinas PK, “Diantaranya kami melihat sangat bermasalah terutama di pengelolaan DAK baik Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),” beber politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku ini. Dia mengungkapkan, proyek bermasalah yang ditemukan itu terjadi di beberapa sekolah, seperti Kabupaten Buru, pekerjaan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan juga dua sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Anggaran dari proyek-proyek bermasalah itu cukup jumbo mencapai miliaran rupiah, sebutnya. Samson Atapary mencontohkan, Lesplang di RAB harus asli, yang dibeli eksabor, yang dipotong dan ditempel. Kemudian pasangan tegel di dinding hanya pakai lem dengan semen. Ini terjadi di SMA 1 Buru. Akibat pemasangan tegel yang demikian, belum lagi berusia lama tegel-tegel yang dipasang tersebut telah berguguran alias lepas.

Selanjutnya, ungkap dia, yang harusnya dibuat pintu, tidak ada pintu, ada ruangan yang 100 persen perabot tidak ada dan sebagainya. “Ini yang jadi problem serius. Kalau pengelolaan di dinas masih seperti begini, ini akan berdampak jangka panjang terhadap pendidikan kita,” tuturnya. Dikatakan, dari hasil koordinasi pihaknya dengan masing-masing Kepala

Sekolah (Kepsek), ternyata pekerjaan bermasalah tersebut telah disampaikan langsung kepada Kadis PK Maluku, hanya saja tidak ditindaklanjuti. "Ini jadi problem di lapangan, sampai Kepsek bilang kita mau mengawasi bagaimana, ini dikerjakan oleh adik Kadis, dan orang-orang yang berhubungan atau berkaitan dengan penguasa. Ini kita belum telusuri apakah dalam proses tender ada KKN disitu atau tidak, mestinya jangan melibatkan keluarga dalam pelaksanaan proyek, karena nanti fungsi pengawasan tidak optimal," sindirnya.

Selain itu, dia mengungkap, terdapat beberapa proyek yang dikelola langsung oleh Kadis PK diduga fiktif, dalam hal ini proyek Survei Manajemen Pelayanan Pendidikan yang mencapai Rp700 juta. "Data yang kita dapat ini ada dugaan langsung dikelola oleh Ibu Kadis, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu Juspi Tuarita Kepala Subbagian (Kasubag) Kepegawaian dan Umum. Mestinya Rp700 juta ini harus tender, dan dugaan ini *output* dari survei itu dibuat fiktif," bongkarnya. Tak hanya itu, dana operasional, rata-rata per Cabang Dinas mendapat Rp300 juta, namun dalam realisasi sesuai perintah Kadis harus dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Mirisnya setelah LPJ dikirim, dana operasional tersebut tidak ditransfer oleh Dinas kepada Cabang Dinas. "Apakah ini masuk di Silpa uang tidak realisasi. Ini terjadi di 11 Kabupaten/Kota cukup besar terutama di Tahap III. Bahkan, ini jadi keluhan dari cabang-cabang dinas, mereka punya ketakutan karena sudah buat LPJ, tapi dananya tidak ditransfer per tanggal 31 Desember,"bebernya.

Dengan temuan itu, pihaknya telah mengundang Kadis PK Maluku untuk mengkonfirmasi hal tersebut, namun kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan DPRD. "Dalam rapat sebelum pengawasan kita sudah minta data-data realisasi pelaksanaan baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun DAK tetapi tidak diberikan secara lengkap. Lewat penelusuran Komisi IV itu ada beberapa proyek yang harus dikonfirmasi dengan dinas, tetapi Kadis tidak pernah hadir, sehingga tidak bisa terkonfirmasi,"cetusnya. Ditambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD Maluku untuk mengambil langkah sebagai tindak lanjut atas temuan dari hasil pengawasan dimaksud.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.kabartimurnews.com/2024/04/01/dewan-bongkar-proyek-di-dinas-pk-maluku-sarat-kkn/>, 01 April 2024; dan
2. <https://www.kabartimurnews.com/2024/04/05/dewan-minta-atensi-jaksa-polisi-usut/>, 01 April 2024.

#### **Catatan:**

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan yang berbeda. Dimana. DAU dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

DAK Fisik Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 tahun yang berkualitas. Dengan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *Major Project*, dan sektor prioritas nasional.